

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
DESA TEGAK**

**PERATURAN DESA TEGAK
NOMOR 4 TAHUN 2023**



**TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**



PERBEKEL DESA TEGAK

PERATURAN DESA TEGAK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA TEGAK,

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); \
 7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
 8. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegak Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK
dan
PERBEKEL DESA TEGAK

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tegak;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegak;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tegak;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
7. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan

- dan kekeluargaan.
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat.
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
- a. Tercapainya dan terpeliharannya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.
 - b. Terwujudnya kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna.
 - c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat.
 - d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB III BENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- (1) Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPM;
 - d. TP PKK;
 - e. Karang Taruna, dan;
 - f. Posyandu
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PEMBENTUKAN RT DAN RW

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan RT adalah paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 100 (seratus) kepala keluarga.
- (2) Syarat pembentukan RW adalah paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- (3) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- (4) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (5) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- (6) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- (7) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- (8) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 7

- (9) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (10) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- (11) Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- (12) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- (13) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- (14) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- (15) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- (16) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- (17) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- (18) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK

- Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- (19) Melaksanakan tertib administrasi; dan
 - (20) Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
 - (21) Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 8

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - c. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - d. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - e. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - f. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - g. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - h. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - i. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - j. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - k. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - l. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - m. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - n. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 9

Posyandu

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- Memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga berencana, imunisasi, gizi, penanggulangan diare;
 - Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja posyandu secara berkesinambungan;
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Desa dan ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan
- (3) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :
- wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Anak, dan Angka Kematian Balita.
 - wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Anak, dan Angka Kematian Balita.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum memenuhi persyaratan:
- Warga Negara Republik Indonesia;
 - Penduduk Desa Tegak, Kecamatan Klungkung;
 - mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
 - tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan yang lainnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris I;
 - Sekretaris II;
 - Bendahara I;
 - Bendahara II; dan
 - Seksi-seksi.
- (2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RT.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara I;
 - f. Bendahara II; dan
 - g. Seksi-seksi
- (2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RW.

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus LPM terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara I;
 - f. Bendahara II; dan
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Seksi Agama
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
 - d. Seksi Lingkungan Hidup
 - e. Seksi Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
 - g. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Pasal 14

- (1) Susunan Pengurus TP PKK terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris I
 - d. Sekretaris I
 - e. Bendahara I
 - f. Bendahara II; dan
 - g. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Bersama;
 - c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - d. Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Seha
- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
- a. Ketua;

- b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara I;
 - f. Bendahara II; dan
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
 - f. Seksi Lingkungan Hidup; dan
 - g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraa.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota

Pasal 16

- (1) Susunan Pengurus Posyandu terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara I;
 - f. Bendahara II; dan
 - g. Unit kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. Kader
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Kader Posyandu yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan di masing-masing unit kelompok kerja.

Seksi-seksi.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 17

Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW :

- (1) Calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh dan dari warga RT dan RW setempat.
- (2) Pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh RT dan RW setempat dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri atau didampingi oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Tata cara pembentukan pengurus LPM :

- (1) Calon pengurus LPM diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan/atau tokoh-tokoh agama.
- (2) Pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.

- (4) Susunan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK :

- (1) Calon pengurus TP PKK diusulkan oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun Banjar Dinas) dan Dasa Wisma.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun dan Dasawisma.
- (4) Susunan Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Tata cara pembentukan pengurus Posyandu :

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa dan harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pemerhati kesehatan lingkungan setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus Posyandu dipilih dari warga masyarakat secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta petugas kesehatan masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
- (7) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai Politik
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 21

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
- (2) Meninggal dunia;

- (3) Permintaan sendiri;
- (4) Diberhentikan.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- (6) Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru.
- (7) Pindah domisili ke desa lain.
- (8) Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (9) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (10) Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 25

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- (1) Swadaya masyarakat;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (4) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (5) Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegak

Ditetapkan di Desa Tegak
Pada tanggal 17 Nopember 2023
KEPALA DESA TEGAK



IGDE DODY SEPTIAN LEGAWANTARA

ndangkan di Desa Tegak
a tanggal 17 Nopember 2023
KRETARIS DESA TEGAK

ETUT ARSA
MBARAN DESA TEGAK TAHUN 2023 NOMOR 4